

## TATA KELOLA KOLABORATIF DALAM PENANGANAN STUNTING DI DESA LAKATONG KECAMATAN MANGARABOMBANG KABUPATEN TAKALAR

Sudiarti Dewi Kurra<sup>1</sup>, Nurmillah<sup>2</sup>, A.M. Azhar Aljurida<sup>3</sup>, Ruslimin<sup>4</sup>, Andi  
Anugerah Mahfuddin<sup>5</sup>, Lukman Arifin<sup>6</sup>, Jusrah Kadoeng<sup>7</sup>

Universitas Indonesia Timur<sup>1, 2, 3, 4, 5, 6, 7</sup>  
Email: [sudiartidewi82@gmail.com](mailto:sudiartidewi82@gmail.com)

### Abstrak

Stunting masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia. Kabupaten Takalar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi daerah prioritas dalam percepatan penurunan stunting karena masih memiliki prevalensi stunting yang relatif tinggi. Penanganan stunting memerlukan tata kelola kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, organisasi nonpemerintah, sektor swasta, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat kapasitas para pemangku kepentingan di Kabupaten Takalar dalam membangun kolaborasi lintas sektor serta mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai media koordinasi, komunikasi, dan integrasi program percepatan penurunan stunting. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi, penyuluhan, diskusi kelompok terarah (*focus group discussion/FGD*), pendampingan, serta wawancara yang melibatkan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, kader kesehatan, dan unsur masyarakat di Kabupaten Takalar. Kegiatan difokuskan pada peningkatan pemahaman mengenai *collaborative governance*, penguatan koordinasi antarlembaga, serta penyusunan strategi percepatan penurunan stunting berbasis SPBE. Hasil kegiatan menunjukkan meningkatnya pemahaman peserta mengenai pentingnya kolaborasi lintas sektor, menguatnya komitmen para pemangku kepentingan dalam mendukung program percepatan penurunan stunting, serta tersusunnya rekomendasi pemanfaatan SPBE untuk mendukung koordinasi, berbagi data, komunikasi, dan pemantauan program secara terpadu. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola kolaboratif yang efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan sehingga mendukung percepatan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Takalar.

**Kata Kunci:** Stunting; Tata Kelola Kolaboratif; Kolaborasi Lintas Sektor.

### Abstract

*Stunting remains a major public health problem that adversely affects the quality of human resources. Takalar Regency is one of the priority regencies in South Sulawesi Province for accelerating stunting reduction due to its relatively high prevalence. Addressing stunting requires collaborative governance involving government agencies, communities, non-governmental organizations, the private sector, higher education institutions, and other relevant stakeholders. This community service program aimed to strengthen the capacity of stakeholders in Takalar Regency to foster cross-sector collaboration while optimizing the implementation of the Electronic-Based Government System (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik—SPBE) as a platform for coordinating, communicating, and integrating stunting reduction programs. The program was implemented through socialization activities, educational sessions, focus group discussions (FGDs), mentoring, and interviews involving local government officials, healthcare workers, sub-district and village governments, community health volunteers, and community representatives in Takalar Regency. The activities focused on*

*enhancing participants' understanding of collaborative governance, strengthening inter-agency coordination, and developing collaborative strategies for accelerating stunting reduction through the implementation of SPBE. The results demonstrated improved participants' understanding of the importance of cross-sector collaboration, strengthened stakeholder commitment to supporting stunting reduction programs, and the formulation of recommendations for utilizing SPBE to facilitate integrated coordination, data sharing, communication, and program monitoring. This community service initiative is expected to strengthen effective, integrated, and sustainable collaborative governance to support the acceleration of stunting reduction in Takalar Regency.*

**Keywords:** *Stunting; Collaborative Governance; Cross-Sector Collaboration.*

## PENDAHULUAN

Indonesia sedang menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul (Marbun et al., 2018; Pramana & Mariyah, 2021; Santika et al., 2020). Salah satu prasyarat utama untuk menghasilkan SDM yang berkualitas adalah terciptanya kondisi kesehatan yang optimal, termasuk melalui upaya pencegahan stunting pada balita. Stunting merupakan salah satu permasalahan gizi kronis yang menjadi perhatian serius dan memerlukan intervensi segera dari pemerintah (Kismul et al., 2018; Mengistu et al., 2013; Muhafidin, 2022; Osazuwa et al., 2011). Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2007, 2010, 2013, dan 2018 masing-masing sebesar 36,8%; 35,6%; 37,2%; dan 30,8% (Kementerian Kesehatan RI, 2018). Melalui kolaborasi lintas sektor, pemerintah diharapkan mampu mempercepat penurunan prevalensi stunting sehingga target Sustainable Development Goals (SDGs) dapat tercapai.

Indonesia sedang menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Salah satu faktor yang memengaruhi kualitas SDM adalah masih tingginya prevalensi stunting pada balita. Stunting merupakan masalah gizi kronis yang berdampak terhadap pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, produktivitas, serta kualitas hidup seseorang pada masa depan. Oleh karena itu, percepatan penurunan stunting menjadi salah satu program prioritas nasional yang memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan melalui pendekatan kolaboratif.

Kabupaten Takalar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi wilayah prioritas dalam percepatan penurunan stunting. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023, prevalensi stunting di Kabupaten Takalar mencapai 35,4%. Melalui berbagai program intervensi yang dilakukan secara terpadu, angka tersebut menurun menjadi 24,0% berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024, atau mengalami penurunan sebesar 11,4 poin persentase. Capaian tersebut menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan, namun prevalensi stunting di Kabupaten Takalar masih memerlukan perhatian dan upaya berkelanjutan agar dapat mencapai target nasional percepatan penurunan stunting.



Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Takalar telah menetapkan Peraturan Bupati Takalar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Percepatan Penurunan Stunting sebagai landasan pelaksanaan program percepatan penurunan stunting secara holistik, integratif, dan berkualitas. Regulasi tersebut menegaskan pentingnya koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara perangkat daerah, pemerintah desa, fasilitas pelayanan kesehatan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan penurunan stunting.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Takalar secara rutin menyelenggarakan koordinasi melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) sebagai wadah kolaborasi lintas sektor untuk menyusun strategi, memperkuat koordinasi, melakukan monitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan program percepatan penurunan stunting. Melalui rapat koordinasi TPPS, pemerintah daerah menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi juga membutuhkan dukungan aktif dari seluruh organisasi perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, kader kesehatan, perguruan tinggi, sektor swasta, dan masyarakat.

Meskipun telah menunjukkan penurunan prevalensi stunting yang cukup signifikan, implementasi program di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain belum optimalnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan integrasi data, belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan program, serta masih rendahnya partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam upaya pencegahan stunting. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan stunting memerlukan penguatan tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) agar setiap pemangku kepentingan mampu menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara sinergis.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat implementasi *collaborative governance* dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Takalar melalui peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan. Kegiatan dilaksanakan melalui sosialisasi, penyuluhan, *focus group discussion* (FGD), pendampingan, serta konsultasi dengan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, kader kesehatan, perguruan tinggi, dan unsur masyarakat. Kegiatan ini juga mendorong optimalisasi pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai media koordinasi, komunikasi, integrasi data, serta pemantauan pelaksanaan program percepatan penurunan stunting. Melalui kegiatan ini diharapkan terbentuk tata kelola kolaboratif yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan sehingga mampu mendukung pencapaian target percepatan penurunan stunting di Kabupaten Takalar serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).



Permasalahan lain yang dihadapi adalah belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan kolaborasi memerlukan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap program berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sistem monitoring dan evaluasi yang belum optimal menyebabkan sulitnya mengukur capaian program, melakukan perbaikan kebijakan, serta membangun pembelajaran bersama antarinstansi yang terlibat.

Di samping itu, partisipasi masyarakat dalam penanganan stunting masih relatif rendah. Padahal, keterlibatan aktif masyarakat merupakan faktor penting dalam keberhasilan program percepatan penurunan stunting. Partisipasi masyarakat tidak hanya berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga berperan dalam meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pencegahan stunting, memperkuat dukungan sosial, serta mendorong penerapan perilaku hidup sehat dan praktik gizi yang baik di tingkat keluarga dan komunitas. Oleh karena itu, diperlukan strategi kolaboratif yang mampu memperkuat koordinasi lintas sektor melalui penyusunan rencana aksi yang jelas, pembagian peran dan tanggung jawab yang terukur, penyediaan sumber daya yang memadai, penguatan sistem monitoring dan evaluasi, serta pemberdayaan masyarakat melalui keterlibatan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program percepatan penurunan stunting.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat implementasi tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan di Desa Lakatong, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar. Pemilihan Desa Lakatong sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan didasarkan pada komitmen pemerintah desa dan tingginya kebutuhan akan penguatan koordinasi lintas sektor dalam mendukung program percepatan penurunan stunting.

Kegiatan difokuskan pada penguatan sinergi antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan, fasilitas pelayanan kesehatan, kader kesehatan, organisasi kemasyarakatan, sektor swasta, perguruan tinggi, serta masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi program penanganan stunting secara terpadu. Pendekatan yang digunakan meliputi sosialisasi, edukasi, diskusi kelompok terarah (*focus group discussion/FGD*), serta pendampingan kepada para pemangku kepentingan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya kolaborasi lintas sektor, memperjelas pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing aktor, memperkuat koordinasi antarlembaga, serta mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai sarana koordinasi, komunikasi, integrasi data, dan pemantauan pelaksanaan program percepatan penurunan stunting secara berkelanjutan.

## METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Lakatong, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, pada Tanggal 6 (enam) Mei 2023.



Model kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif (*participatory approach*) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya memperkuat tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) untuk percepatan penurunan stunting. Sasaran kegiatan meliputi pemerintah desa, pemerintah kecamatan, tenaga kesehatan dari puskesmas, kader Posyandu, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta perwakilan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu observasi awal untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan mitra, koordinasi dengan pemerintah desa dan instansi terkait, penyusunan materi edukasi, pelaksanaan sosialisasi, diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion/FGD*), serta pendampingan kepada para pemangku kepentingan.

Materi yang diberikan meliputi konsep *collaborative governance*, pembagian peran lintas sektor, strategi percepatan penurunan stunting, serta optimalisasi pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai media koordinasi, komunikasi, integrasi data, dan pemantauan program. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui observasi partisipatif, diskusi reflektif, serta pengukuran tingkat pemahaman peserta menggunakan pre-test dan post-test. Keberhasilan kegiatan diukur berdasarkan peningkatan pemahaman peserta, meningkatnya komitmen kolaborasi antarpemangku kepentingan, serta tersusunnya rekomendasi strategi kolaboratif yang dapat diimplementasikan secara berkelanjutan dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Desa Lakatong, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Lakatong, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar berlangsung sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan, meliputi sosialisasi, penyuluhan, *focus group discussion* (FGD), dan pendampingan kepada para pemangku kepentingan. Kegiatan melibatkan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, tenaga kesehatan, kader Posyandu, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), organisasi kemasyarakatan, serta unsur masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat kolaborasi dalam percepatan penurunan stunting. Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya tata kelola kolaboratif, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai sarana integrasi data, komunikasi, dan monitoring program. Selain meningkatkan kapasitas peserta, kegiatan ini juga menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program percepatan penurunan stunting secara berkelanjutan. Hasil tersebut selanjutnya dibahas berdasarkan dua fokus utama, yaitu peningkatan kapasitas pemangku kepentingan melalui pendekatan *collaborative governance* dan penguatan sinergi lintas sektor melalui pemanfaatan SPBE dalam mendukung percepatan penurunan stunting.



## **Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan melalui Pendekatan Collaborative Governance**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Lakatong, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas pemangku kepentingan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam memperkuat implementasi percepatan penurunan stunting. Sebelum kegiatan dilaksanakan, hasil observasi lapangan, wawancara, dan diskusi awal menunjukkan bahwa koordinasi antarpemangku kepentingan sebenarnya telah berjalan melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, puskesmas, kader Posyandu, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), organisasi kemasyarakatan, serta tokoh masyarakat. Namun, koordinasi tersebut masih bersifat sektoral karena setiap institusi lebih berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Akibatnya, proses pertukaran informasi, sinkronisasi program, pembagian peran, serta evaluasi kegiatan belum dilaksanakan secara terpadu sehingga efektivitas intervensi dalam percepatan penurunan stunting belum mencapai hasil yang optimal. Kondisi ini sejalan dengan temuan Afandi, Anomsari, Novira, dan Sudartini (2023) yang menunjukkan bahwa kolaborasi dalam program percepatan penurunan stunting sering kali masih didominasi oleh pendekatan sektoral sehingga partisipasi aktor nonpemerintah belum berjalan secara optimal.

Selain itu, masih ditemukan perbedaan persepsi mengenai konsep penanganan stunting yang terintegrasi. Sebagian peserta masih memandang bahwa penanganan stunting merupakan tanggung jawab utama sektor kesehatan, sementara kontribusi sektor lain seperti pemerintah desa, pendidikan, sanitasi, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan sosial belum dipahami secara menyeluruh. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya penyusunan program lintas sektor yang saling mendukung, sehingga beberapa kegiatan berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya keterpaduan dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Di sisi lain, keterbatasan forum koordinasi yang dilakukan secara rutin juga menyebabkan berbagai permasalahan di lapangan sering kali terlambat diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara bersama. Temuan tersebut konsisten dengan penelitian Fatikha dan Permatasari (2023) yang menyimpulkan bahwa keberhasilan penanganan stunting membutuhkan keterlibatan aktif seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam kerangka tata kelola kolaboratif.

Melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*), dan pendampingan, para peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting. Selama proses diskusi, setiap pemangku kepentingan diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, menyampaikan pengalaman pelaksanaan program, serta merumuskan solusi bersama sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pendekatan partisipatif tersebut mendorong terciptanya komunikasi yang lebih terbuka, meningkatkan rasa saling percaya antarlembaga, serta





memperkuat komitmen bersama dalam mendukung keberhasilan program percepatan penurunan stunting di Desa Lakatong. Pendekatan seperti ini dinilai mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan kolaboratif dan memperkuat rasa memiliki terhadap program pembangunan kesehatan masyarakat.



**Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan**

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas tidak hanya tercermin dari bertambahnya pengetahuan peserta mengenai kebijakan dan strategi penurunan stunting, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran akan pentingnya kerja sama, koordinasi, dan integrasi program sebagai prasyarat utama dalam mewujudkan penanganan stunting yang efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kapasitas tersebut merupakan fondasi penting dalam membangun konvergensi program percepatan penurunan stunting di tingkat desa.

Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan mitra, kegiatan pengabdian difokuskan pada penguatan pemahaman mengenai konsep *collaborative governance* sebagai pendekatan yang menempatkan seluruh pemangku kepentingan sebagai mitra yang memiliki tanggung jawab bersama dalam menyelesaikan permasalahan publik. Kegiatan diawali dengan sosialisasi mengenai kebijakan nasional percepatan penurunan stunting, peran pemerintah daerah, serta pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mencapai target penurunan stunting. Materi kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai pembagian peran setiap aktor, mulai dari pemerintah desa, puskesmas, kader kesehatan, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, hingga sektor swasta dalam mendukung intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Pendekatan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Lautt dan Rahayu (2024) yang menunjukkan bahwa keberhasilan penurunan stunting dipengaruhi oleh kepemimpinan kolaboratif, integrasi kebijakan daerah, dan komitmen seluruh pemangku kepentingan.

Selanjutnya, kegiatan dilaksanakan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan seluruh peserta secara aktif. Forum diskusi ini menjadi media untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program percepatan penurunan stunting. Berdasarkan hasil diskusi, beberapa permasalahan yang mengemuka antara lain belum optimalnya komunikasi lintas sektor, keterbatasan

integrasi data antara pemerintah desa dan fasilitas pelayanan kesehatan, rendahnya keterlibatan sektor swasta dalam mendukung program, serta masih terbatasnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai pentingnya pencegahan stunting sejak periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Selain itu, peserta juga mengidentifikasi perlunya mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur agar setiap program yang dilaksanakan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling melengkapi dalam mencapai tujuan bersama. Kondisi serupa juga ditemukan dalam penelitian Ibrahim, Leus, Ngatmono, dan Dewi (2024) yang menekankan pentingnya pendekatan *pentahelix* untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi dalam penanganan stunting.

Pelaksanaan FGD memberikan ruang dialog yang lebih terbuka antarpemangku kepentingan sehingga setiap peserta dapat menyampaikan pengalaman, kendala, maupun usulan solusi berdasarkan kondisi yang dihadapi di lapangan. Pemerintah desa menyampaikan pentingnya dukungan lintas sektor dalam penyusunan program desa yang responsif terhadap isu stunting, sementara tenaga kesehatan menekankan perlunya penguatan edukasi kepada keluarga sasaran. Di sisi lain, kader Posyandu mengemukakan perlunya peningkatan kapasitas kader dalam melakukan pendampingan kepada ibu hamil dan keluarga yang memiliki balita berisiko stunting. Diskusi tersebut menghasilkan kesepahaman bahwa percepatan penurunan stunting memerlukan komitmen bersama yang tidak hanya berorientasi pada pelayanan kesehatan, tetapi juga mencakup aspek sanitasi, pendidikan, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan sosial. Temuan ini mendukung model konvergensi multisektor dalam percepatan penurunan stunting yang dikembangkan oleh Sapri, Mardhatillah, dan Ramlan (2025).

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya tata kelola kolaboratif dalam penyelenggaraan program percepatan penurunan stunting. Hal ini terlihat dari meningkatnya partisipasi peserta selama proses diskusi, munculnya berbagai gagasan kolaboratif, serta adanya kesepakatan untuk memperkuat koordinasi melalui pertemuan rutin lintas sektor. Selain itu, peserta juga menunjukkan komitmen untuk meningkatkan pertukaran informasi mengenai sasaran program, pelaksanaan intervensi, serta hasil pemantauan pertumbuhan balita sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat dan berbasis data. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Atika, Redjo, dan Kartini (2025) yang menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola kolaboratif dalam penanganan stunting ditentukan oleh komunikasi yang inklusif, komitmen bersama, dan keberlanjutan koordinasi lintas sektor.

Temuan tersebut sejalan dengan model *Collaborative Governance* yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2008), yang menjelaskan bahwa keberhasilan kolaborasi dipengaruhi oleh beberapa komponen utama, yaitu kondisi awal (*starting conditions*), kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*), desain kelembagaan (*institutional design*), dan proses kolaborasi (*collaborative process*). Dalam kegiatan pengabdian ini, proses sosialisasi dan FGD berperan sebagai media untuk membangun

dialog tatap muka (*face-to-face dialogue*) yang memungkinkan terbangunnya rasa saling percaya (*trust building*), komitmen terhadap proses (*commitment to process*), pemahaman bersama (*shared understanding*), serta pencapaian hasil antara (*intermediate outcomes*). Melalui proses tersebut, setiap pemangku kepentingan memperoleh kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan, membangun kesepakatan, dan menyusun strategi kolaboratif dalam mendukung percepatan penurunan stunting.

Peningkatan kapasitas yang diperoleh peserta juga mencerminkan bahwa kegiatan pengabdian tidak hanya memberikan tambahan pengetahuan, tetapi juga memperkuat kemampuan para pemangku kepentingan dalam membangun jejaring kerja sama yang lebih efektif. Kondisi ini penting mengingat penanganan stunting merupakan persoalan multidimensi yang tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja. Pendekatan kolaboratif memungkinkan setiap aktor memanfaatkan sumber daya, informasi, dan kewenangannya secara terpadu sehingga program yang dilaksanakan menjadi lebih efisien dan memiliki dampak yang lebih luas terhadap masyarakat.

Hasil kegiatan ini memiliki kesesuaian dengan berbagai penelitian terdahulu. Penelitian Emerson dan Nabatchi (2021) menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola kolaboratif sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan, kepemimpinan, komunikasi yang intensif, dan partisipasi aktif para pemangku kepentingan. Penelitian lain oleh Muhafidin (2022) juga menyimpulkan bahwa percepatan penurunan stunting memerlukan integrasi kebijakan lintas sektor serta keterlibatan aktif pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Temuan serupa dilaporkan oleh Karim dkk. (2023), yang menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan masyarakat berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas program penurunan stunting di Sulawesi Selatan.

Lebih lanjut, penelitian Yusriadi dan Cahaya (2022) menegaskan bahwa penerapan tata kelola kolaboratif mampu meningkatkan kualitas koordinasi antarlembaga melalui pembagian peran yang jelas, komunikasi yang terbuka, serta adanya komitmen bersama dalam mencapai tujuan pembangunan. Temuan tersebut memperkuat hasil pengabdian ini, di mana proses sosialisasi, diskusi, dan pendampingan mampu meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan untuk bekerja secara lebih sinergis dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Desa Lakatong.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas melalui pendekatan *collaborative governance* menjadi fondasi penting dalam membangun sinergi lintas sektor. Melalui peningkatan pemahaman, penguatan komunikasi, dan pembentukan komitmen bersama, para pemangku kepentingan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk mengimplementasikan program percepatan penurunan stunting secara terpadu. Hasil ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kolaborasi yang telah

terbentuk dapat berkembang menjadi sistem tata kelola yang adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

### **Penguatan Sinergi Lintas Sektor melalui Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Percepatan Penurunan Stunting**

Salah satu fokus utama kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Lakatong, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar adalah memperkuat sinergi lintas sektor melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pendekatan ini didasarkan pada kenyataan bahwa penanganan stunting merupakan persoalan multidimensional yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui intervensi sektor kesehatan, tetapi memerlukan koordinasi yang terintegrasi antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan, puskesmas, kader Posyandu, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat. Penanganan stunting memerlukan tata kelola yang mampu mengintegrasikan berbagai aktor dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, serta evaluasi secara bersama-sama.

Menurut Ansell dan Gash (2008), keberhasilan *collaborative governance* sangat dipengaruhi oleh proses dialog, pembangunan kepercayaan (*trust building*), komitmen bersama, serta pembelajaran antarpemangku kepentingan. Selanjutnya, Emerson dan Nabatchi (2015) menegaskan bahwa kolaborasi yang efektif hanya dapat diwujudkan apabila terdapat keterlibatan aktif seluruh aktor melalui mekanisme koordinasi yang berkelanjutan dan kapasitas aksi bersama (*capacity for joint action*). Sementara itu, World Health Organization (2023) menekankan bahwa percepatan penurunan stunting memerlukan koordinasi multisektor yang mengintegrasikan pelayanan kesehatan, sanitasi, pendidikan, perlindungan sosial, dan tata kelola pemerintahan.

Hasil pendampingan menunjukkan bahwa sebelum kegiatan dilaksanakan, koordinasi antarpemangku kepentingan masih didominasi oleh komunikasi yang bersifat administratif dan dilakukan secara insidental. Pertukaran informasi mengenai sasaran intervensi, jadwal pelayanan kesehatan, kondisi balita berisiko stunting, maupun hasil pemantauan pertumbuhan anak masih dilakukan secara manual sehingga sering menimbulkan keterlambatan informasi. Selain itu, data yang dimiliki oleh pemerintah desa, puskesmas, kader Posyandu, dan organisasi perangkat daerah belum sepenuhnya terintegrasi sehingga masih ditemukan perbedaan data sasaran pada beberapa kegiatan. Kondisi tersebut menyebabkan potensi duplikasi program dan belum optimalnya penentuan prioritas intervensi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Bhutta et al. (2020) yang menjelaskan bahwa lemahnya koordinasi lintas sektor dan fragmentasi sistem informasi menjadi salah satu penyebab rendahnya efektivitas program penurunan stunting di berbagai negara berkembang.

Melalui kegiatan pendampingan, peserta diberikan pemahaman mengenai fungsi SPBE sebagai instrumen yang tidak hanya mendukung digitalisasi administrasi pemerintahan, tetapi juga memperkuat tata kelola kolaboratif dalam pelayanan publik.



Diskusi menekankan bahwa implementasi SPBE dapat dimanfaatkan sebagai media koordinasi lintas sektor melalui integrasi data, komunikasi berbasis teknologi informasi, penyusunan laporan secara elektronik, serta pemantauan perkembangan pelaksanaan program secara berkelanjutan. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, pemerintah desa bersama puskesmas dan TPPS memiliki peluang yang lebih besar untuk melakukan identifikasi keluarga berisiko stunting, memantau tindak lanjut intervensi, dan mengevaluasi capaian program secara lebih cepat dan akurat. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Janssen dan van der Voort (2020) yang menyatakan bahwa transformasi digital pemerintahan mampu meningkatkan efektivitas koordinasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan memperkuat kolaborasi antarorganisasi publik.

Selama proses pendampingan, peserta secara aktif mengidentifikasi berbagai informasi yang perlu diintegrasikan dalam pelaksanaan program, antara lain data ibu hamil, bayi dan balita, status gizi, kondisi sanitasi, cakupan imunisasi, kepesertaan jaminan kesehatan, serta program bantuan sosial yang diterima keluarga sasaran. Kesepahaman mengenai pentingnya integrasi data tersebut menjadi salah satu hasil penting dari kegiatan pengabdian karena dapat mengurangi duplikasi pendataan dan meningkatkan ketepatan sasaran intervensi. Selain itu, peserta juga menyepakati perlunya forum koordinasi rutin yang didukung oleh pemanfaatan media digital sehingga komunikasi tidak hanya dilakukan pada saat rapat formal, tetapi dapat berlangsung secara berkesinambungan. Menurut OECD (2023), pemerintahan digital yang terintegrasi mampu meningkatkan transparansi, interoperabilitas data, serta kualitas pelayanan publik melalui kolaborasi yang lebih efektif antarinstansi.

Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan adanya perubahan positif terhadap pemahaman peserta mengenai pemanfaatan SPBE dalam mendukung koordinasi lintas sektor. Pemerintah desa mulai memahami pentingnya digitalisasi data pelayanan dasar sebagai dasar penyusunan kebijakan desa, sedangkan tenaga kesehatan dan kader Posyandu menilai bahwa integrasi informasi akan mempermudah pemantauan kondisi balita secara berkala. Di sisi lain, tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan menyampaikan komitmen untuk mendukung penyebaran informasi mengenai pencegahan stunting melalui media komunikasi yang lebih efektif sehingga edukasi kepada masyarakat dapat dilakukan secara berkelanjutan. Temuan ini mendukung penelitian Gil-Garcia, Dawes, dan Pardo (2018) yang menyatakan bahwa integrasi sistem informasi pemerintahan mampu meningkatkan koordinasi lintas organisasi dan menghasilkan pelayanan publik yang lebih responsif.

Temuan tersebut dapat dianalisis menggunakan kerangka *Collaborative Governance Regime* (CGR) yang dikembangkan oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012). Dalam kerangka tersebut, keberhasilan kolaborasi dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu *principled engagement*, *shared motivation*, dan *capacity for joint action*. *Principled engagement* tercermin dari proses dialog yang terbuka selama sosialisasi dan FGD ketika seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi dalam

mengidentifikasi permasalahan dan menyusun solusi bersama. *Shared motivation* terlihat dari meningkatnya rasa saling percaya, komitmen, dan tanggung jawab bersama dalam mendukung percepatan penurunan stunting. Sementara itu, *capacity for joint action* diwujudkan melalui penguatan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan SPBE, serta kesepakatan untuk meningkatkan integrasi data dan koordinasi lintas sektor. Analisis tersebut juga memperkuat model *Collaborative Governance* yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2008) yang menekankan bahwa dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen bersama, dan pembelajaran kolektif merupakan faktor utama keberhasilan kolaborasi.

Implementasi SPBE dalam konteks pengabdian ini tidak diposisikan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai instrumen yang memperkuat tata kelola kolaboratif. SPBE memungkinkan terbangunnya sistem koordinasi yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Integrasi data antarinstansi juga mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*) sehingga setiap program yang dilaksanakan dapat diarahkan kepada kelompok sasaran yang benar-benar membutuhkan intervensi. Dengan demikian, SPBE berfungsi sebagai *enabler* yang mempercepat proses kolaborasi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Menurut Mergel, Edelman, dan Haug (2019), transformasi digital pemerintahan merupakan instrumen strategis dalam membangun tata kelola kolaboratif karena mampu menghubungkan berbagai organisasi melalui sistem informasi yang interoperabel.

Hasil pengabdian ini juga sejalan dengan penelitian Torlesse et al. (2022) yang menunjukkan bahwa keberhasilan percepatan penurunan stunting sangat dipengaruhi oleh konvergensi program lintas sektor, penguatan kapasitas pemerintah daerah, serta keterlibatan aktif masyarakat. Penelitian Akombi et al. (2022) juga menyimpulkan bahwa integrasi kebijakan, kepemimpinan kolaboratif, dan sistem informasi yang baik merupakan determinan penting dalam mempercepat penurunan prevalensi stunting di negara berkembang.

Berdasarkan hasil pendampingan, model kolaborasi yang direkomendasikan dalam kegiatan pengabdian ini adalah model tata kelola kolaboratif berbasis desa yang didukung oleh pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Model tersebut menempatkan Pemerintah Desa Lakatong sebagai koordinator pelaksanaan program di tingkat lokal yang berperan mengintegrasikan berbagai sumber daya, kebijakan, serta partisipasi seluruh pemangku kepentingan, meliputi Puskesmas Mangarabombang, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), kader Posyandu, pemerintah kecamatan, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, sektor swasta, dan masyarakat. Melalui mekanisme koordinasi yang terstruktur, setiap aktor memiliki peran yang jelas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program percepatan penurunan stunting sehingga pelaksanaan intervensi menjadi lebih efektif dan terarah.

Menurut Aji, Sugiyanto, dan Sushartami (2026), keberhasilan tata kelola kolaboratif sangat ditentukan oleh kemampuan para aktor untuk membangun koordinasi, berbagi informasi, dan menyepakati tujuan bersama dalam menyelesaikan persoalan publik yang bersifat kompleks.

Pemanfaatan SPBE dalam model kolaborasi ini tidak hanya diarahkan pada digitalisasi administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen integrasi data, komunikasi, pelaporan, serta monitoring pelaksanaan program secara berkelanjutan. Selama proses pendampingan, seluruh pemangku kepentingan menyepakati pentingnya penyatuan data keluarga berisiko stunting, data ibu hamil, balita, status gizi, sanitasi, dan program bantuan sosial sehingga setiap intervensi dapat dilakukan secara tepat sasaran. Integrasi data tersebut diharapkan mampu mengurangi duplikasi pendataan, meningkatkan akurasi informasi, serta mempercepat proses pengambilan keputusan berbasis data. Hasil ini sejalan dengan temuan OECD (2023) yang menyatakan bahwa transformasi digital pemerintahan mampu meningkatkan interoperabilitas data, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan menghasilkan pelayanan publik yang lebih efektif serta akuntabel.

Selain penguatan sistem informasi, kegiatan pendampingan juga menghasilkan kesepakatan mengenai pembentukan forum koordinasi rutin yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Forum tersebut berfungsi sebagai media berbagi informasi, penyelesaian permasalahan di lapangan, penyusunan rencana tindak lanjut, serta evaluasi capaian program secara berkala. Pendekatan ini memperkuat komunikasi antarlembaga sehingga setiap perubahan kondisi sasaran dapat segera direspons melalui tindakan yang terkoordinasi. World Health Organization (2023) menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting memerlukan koordinasi multisektor yang didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi agar intervensi gizi spesifik dan sensitif dapat berjalan secara sinergis.

Pelaksanaan kegiatan juga menunjukkan adanya peningkatan kapasitas aparatur desa, tenaga kesehatan, kader Posyandu, serta unsur masyarakat dalam memahami pentingnya tata kelola kolaboratif berbasis teknologi informasi. Pemerintah desa mulai memanfaatkan data digital sebagai dasar penyusunan kebijakan, sementara tenaga kesehatan lebih mudah melakukan pemantauan tumbuh kembang balita dan evaluasi cakupan pelayanan kesehatan. Di sisi lain, kader Posyandu dan organisasi kemasyarakatan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya penyampaian informasi kesehatan secara cepat dan berkelanjutan kepada masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rosalyn dan Purwanti (2025) yang menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem pemerintahan digital sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, serta kolaborasi antarinstansi dalam mendukung pelayanan publik.

Dengan demikian, model tata kelola kolaboratif berbasis desa yang didukung SPBE menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan efektivitas koordinasi, memperkuat integrasi data, memperjelas pembagian peran antarpemangku

kepentingan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam percepatan penurunan stunting. Model ini juga mendorong terwujudnya sistem pengambilan keputusan yang lebih cepat, transparan, dan berbasis bukti sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan. Apabila diterapkan secara konsisten dan disertai komitmen seluruh pihak, model ini berpotensi menjadi praktik baik (*best practice*) yang dapat direplikasi pada desa-desa lain di Kabupaten Takalar.

## KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Lakatong, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar menunjukkan bahwa pendekatan *collaborative governance* mampu memperkuat implementasi percepatan penurunan stunting melalui peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan. Sosialisasi, penyuluhan, *focus group discussion* (FGD), dan pendampingan berhasil meningkatkan pemahaman pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader Posyandu, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat mengenai pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menangani stunting secara terpadu. Kegiatan ini juga memperkuat komunikasi, membangun komitmen bersama, memperjelas pembagian peran, serta meningkatkan koordinasi antarlembaga dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program. Selain itu, pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dipahami sebagai instrumen strategis untuk mengintegrasikan data, mempercepat pertukaran informasi, meningkatkan efektivitas koordinasi, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Integrasi data dan forum koordinasi yang berkelanjutan diharapkan mampu meningkatkan ketepatan sasaran intervensi serta mengurangi duplikasi program. Secara keseluruhan, penguatan tata kelola kolaboratif berbasis desa yang didukung SPBE berpotensi meningkatkan efektivitas program percepatan penurunan stunting secara berkelanjutan. Model ini dapat dijadikan praktik baik (*best practice*) bagi desa lain dalam membangun sinergi lintas sektor guna mendukung pencapaian target nasional penurunan stunting dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

## REFERENSI

- Aji, K. B., Sugiyanto, C., & Sushartami, W. (2026). Multiple governmentalities and mangrove ecotourism destination governance in the Batam Islands. *Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events*. Advance online publication.
- Akombi, B. J., Agho, K. E., Hall, J. J., Wali, N., Renzaho, A. M. N., & Merom, D. (2022). Stunting, wasting and underweight in Sub-Saharan Africa: A systematic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.

- Atika, N., Redjo, S., & Kartini, D. (2025). Collaborative governance in accelerating stunting reduction through multi-stakeholder collaboration. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Afandi, M., Anomsari, E., Novira, N., & Sudartini, S. (2023). Collaborative governance dalam percepatan penurunan stunting di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*.
- Bhutta, Z. A., Das, J. K., Rizvi, A., et al. (2020). Evidence-based interventions for improvement of maternal and child nutrition. *The Lancet*.
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative governance regimes*. Georgetown University Press.
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2021). *Evaluating collaborative governance: A framework for public sector practice*. Georgetown University Press.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.
- Fatikha, D., & Permatasari, R. (2023). Collaborative governance dalam percepatan penurunan stunting berbasis multisektor. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*.
- Gil-Garcia, J. R., Dawes, S. S., & Pardo, T. A. (2018). Digital government and public management research: Finding the crossroads. *Public Management Review*.
- Ibrahim, A., Leus, Y., Ngatmono, N., & Dewi, S. (2024). Pendekatan pentahelix dalam percepatan penurunan stunting di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Janssen, M., & van der Voort, H. (2020). Agile and adaptive governance in crisis response: Lessons from the COVID-19 pandemic. *International Journal of Information Management*, 55, 102180.
- Karim, A., et al. (2023). Collaborative governance in stunting prevention in South Sulawesi. *Journal of Public Administration and Governance*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Hasil utama Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018*. Kementerian Kesehatan RI.
- Kismul, H., Acharya, P., Mapatano, M. A., & Hatløy, A. (2018). Determinants of childhood stunting in the Democratic Republic of Congo. *BMC Public Health*, 18, 74.
- Lautt, R., & Rahayu, A. (2024). Collaborative leadership in accelerating stunting reduction at the local government level. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*.
- Marbun, R., et al. (2018). Human resource development and national competitiveness in Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*.
- Mengistu, K., Alemu, K., & Destaw, B. (2013). Prevalence of malnutrition and associated factors among children in Ethiopia. *BMC Nutrition*.

- Mergel, I., Edelman, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly*, 36(4).
- Muhafidin, D. (2022). Collaborative governance dalam percepatan penurunan stunting di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*.
- OECD. (2023). *Digital government review: Strengthening digital government for better public governance*. OECD Publishing.
- Osazuwa, F., et al. (2011). A significant association between intestinal helminth infection and nutritional status among children. *Nigerian Journal of Clinical Practice*.
- Peraturan Bupati Takalar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
- Pramana, R., & Mariyah, S. (2021). Human capital development and public policy in Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan*.
- Rosalyn, D., & Purwanti, E. (2025). Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. *Jurnal Administrasi Negara*.
- Santika, O., et al. (2020). Stunting and child development in Indonesia. *Nutrients*.
- Sapri, M., Mardhatillah, M., & Ramlan, R. (2025). Model konvergensi multisektor dalam percepatan penurunan stunting. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*.
- Survei Kesehatan Indonesia. (2023). *Laporan Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Survei Status Gizi Indonesia. (2024). *Hasil Survei Status Gizi Indonesia Tahun 2024*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Torlesse, H., Raju, D., Rizal, M. F., et al. (2022). Determinants of child stunting reduction in Indonesia: A multi-sectoral analysis. *Maternal & Child Nutrition*.
- World Health Organization. (2023). *Laboratory systems strengthening for health security and universal health coverage*. World Health Organization.
- Yusriadi, Y., & Cahaya, A. (2022). Collaborative governance in public service management: Evidence from Indonesia. *International Journal of Social Sciences and Management Review*.